



ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KINERJAKOPERASI STUDI KASUS KOPERASI SUMBER KASIH SEJAHTERA

Nurhikmah, Muhammad Zaini

Administrasi Bisnis, Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar operasional prosedur pada kinerja Koperasi Simpan Pinjam Sumber Kasih Sejahtera. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan melalui teori Edward III, yang menyoroti empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota koperasi, yang menciptakan harmonisasi dan pemahaman yang merata dalam penerapan kebijakan SOP. Sosialisasi kebijakan juga dilakukan dengan efektif kepada para anggota koperasi; (2) Sumber daya manusia dan finansial yang memadai mendukung implementasi kebijakan, di mana keberadaan sumber daya manusia yang terampil difasilitasi oleh dukungan finansial, sehingga kebutuhan pengurus, karyawan, dan anggota terpenuhi, termasuk pendidikan anggota untuk memahami kebijakan SOP; (3) Disposisi pelaksana, yang mencakup sikap, komitmen, konsistensi, disiplin, dan kejujuran pengurus dan anggota koperasi, menunjukkan hal yang positif dalam penerapan kebijakan; (4) Struktur birokrasi pada koperasi simpan pinjam sumber kasih sejahtera sudah sangat jelas dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas tentunya mempengaruhi sebuah kebijakan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi ,SOP,Koperasi.

PENDAHULUAN

Dalam masa Globalisasi, kompetisi di sektor ekonomi. Semakin hari semakin ketat. Karena itu, setiap perubahan yang muncul harus dihitung

dan dipersiapkan. Hal ini juga berlaku bagi pelaku ekonomi, khususnya koperasi, yang dituntut untuk responsif dalam mengambil keputusan agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan

keuntungan atau malah mengalami kerugian. Sehubungan dengan itu, koperasi perlu lebih kuat dalam menghadapi perubahan dan persaingan baik di dalam lingkungan koperasi sendiri maupun dalam kompetisi dengan lembaga keuangan non-bank lainnya, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (Budiyanto, 2013). Di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai alat untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi sosial, sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia, dan sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi Bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat merupakan fungsi koperasi Indonesia.

Menurut Soeriaatmadja dalam Hendrojogi (2015:21-22), koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang-orang yang bersatu atas dasar kesetaraan sebagai manusia. Mereka bergabung secara sukarela, tanpa memandang perbedaan agama dan politik, untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat material dengan tanggung jawab kolektif. Koperasi merupakan organisasi yang diakui secara hukum, di mana para anggotanya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang akan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain berperan sebagai gerakan ekonomi masyarakat, koperasi juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Berbagai jenis koperasi ada yang dibentuk berdasarkan kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggotanya, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (sebagai lembaga keuangan), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran,

dan Koperasi Serba Usaha (Munir dan Indarti, 2012).

Penelitian ini menitik beratkan pada koperasi simpan pinjam yang dikenal sebagai USP. USP merupakan sebuah unit koperasi yang beroperasi dalam sektor simpanan, pinjaman, dan pembiayaan, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Prinsip koperasi mencakup kemandirian, keanggotaan, keterbukaan, manajemen yang dikelola secara demokratis, serta distribusi laba yang adil berdasarkan ruang lingkup layanan untuk setiap anggota. Selain itu, terdapat pula pemberian imbalan terbatas pada modal, yang mencakup pelatihan untuk anggota koperasi. Karakteristik unik koperasi yang membedakannya dari jenis usaha lainnya adalah identitas ganda anggotanya, di mana mereka bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi (Sugianto, 2002).

Menurut Kasmir (2012:86), istilah kredit berasal dari kata Latin "credere," yang berarti kepercayaan. Dengan demikian, kepercayaan adalah dasar dari pemberian kredit, di mana pemberi pinjaman yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menekankan pentingnya setiap anggota untuk menghormati komitmen mereka. Koperasi dan serikat simpan pinjam harus memperhatikan aspek persuasif dalam proses penyaluran kredit agar berjalan dengan lancar. Tindakan ini penting untuk menghindari piutang yang tidak tertagih, yang dapat berdampak negatif pada operasi koperasi dan mengakibatkan kerugian.

Pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan koperasi, hal ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian yang menentukan, "Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya

kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa". Tata kelola koperasi yang baik harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 yang secara tegas menyatakan, "Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan simpan pinjam". Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi diatur dalam Pasal 19 angka (1) huruf b Permenkop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 yang menentukan, "Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi meliputi memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya.

Salah satu sistem penting yang perlu diterapkan oleh koperasi adalah Sistem Operasional Prosedur (SOP), yang berfungsi sebagai panduan dalam aktivitas serta penggunaan sumber daya yang tersedia. Di Indonesia, termasuk di Balikpapan, terlihat bahwa banyak koperasi yang belum memanfaatkan SOP secara optimal, sehingga kesulitan untuk bersaing dengan usaha lainnya. Berdasarkan observasi, beberapa koperasi di Balikpapan menunjukkan kurangnya atau tidak adanya penerapan SOP yang baik, sehingga dibutuhkan metode analisis untuk penelitian lebih lanjut. Untuk menilai efektivitas penerapan kebijakan SOP dalam kinerja koperasi simpan pinjam, sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2023 mengenai usaha simpan pinjam oleh koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana informasi yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan untuk memahami

kebijakan yang diterapkan untuk mengevaluasi indikator keberhasilan penerapan SOP dalam efektivitas kinerja koperasi simpan pinjam pada studi kasus koperasi Sumber Kasih Sejahtera Balikpapan. Koperasi Credit Union (CU) adalah sebagai tindakan sosial di mana anggota suatu komunitas berkumpul untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan bersama, dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada. Koperasi CU merupakan salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi, yang dapat melibatkan berbagai kalangan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama atau usia. Sehingga setiap individu dapat bertanggung jawab atas masa depannya.

Anggota yang kurang beruntung dapat meningkatkan kesejahteraannya, sementara mereka yang sudah mapan dapat memberikan manfaat sosial dari simpanan mereka untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ini bukan sekadar kegiatan amal atau donasi, melainkan modal untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Lokasi penelitian berada di jalan arjuna, gunung samarinda, kota Balikpapan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui kegiatan ini berfokus pada para pengelola koperasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mempermudah pengawasan, menjaga kualitas pelayanan koperasi, mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan kinerja koperasi. Tujuan dari analisis SOP juga berpacu pada perkembangan era zaman saat ini dalam perkembangan zaman adanya perubahan regulasi yang tentunya akan mempengaruhi kegiatan operasional koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan dan implementasi kebijakan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Penting untuk memperhatikan dan mengatasi potensi masalah dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasinya. Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dapat membantu meminimalkan hambatan terhadap implementasi kebijakan dan meningkatkan kemungkinan menerima dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dengan model analisa seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. George Edward III mengemukakan bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan. Ia menyatakan bahwa tanpa pelaksanaan yang efektif, keputusan para pembuat kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan sukses (Tachjan, 2016). Ada empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi mencakup cara penyampaian kebijakan kepada organisasi atau masyarakat dan tanggapan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan dukungan, terutama dalam hal sumber daya manusia, dengan penekanan pada kemampuan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif (Dewi, 2019). Disposisi mengacu pada kesiapan para pelaksana untuk menerapkan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berhubungan dengan sejauh mana organisasi birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dapat berfungsi dengan baik

dan efektif. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkan pedoman SOP untuk kinerja koperasi simpan pinjam diantaranya:

Komunikasi

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, komunikasi merupakan elemen krusial yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi ini mencakup cara penyampaian kebijakan kepada organisasi publik dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan masyarakat.

Melalui komunikasi yang baik, tujuan dan sasaran kebijakan dapat disampaikan dengan jelas, sehingga dapat meminimalkan distorsi atau penolakan. Penerimaan terhadap kebijakan tersebut berkontribusi pada efektivitas serta kinerja koperasi secara terstruktur, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Komunikasi memainkan peran krusial pada anggota koperasi karena semakin baik pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan sop yang ditetapkan semakin kecil kemungkinan terjadinya penolakan dan kesalahan saat pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, pemahaman yang mendalam juga memfasilitasi penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) secara lebih efisien. Menurut Edward III, terdapat tiga elemen penting dalam dimensi komunikasi: (1) transmisi, yang berkaitan dengan cara informasi disampaikan kepada masyarakat ataupun pengguna kebijakan, (2) kejelasan informasi yang diberikan, dan (3) konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diinformasikan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa dimensi komunikasi yang relevan seperti berikut.

Transmisi : sebagai saluran utama menyampaikan informasi dan sosialisasi peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 8 pasal 23 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam pada penghimpunan dan penyaluran dana oleh koperasi. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian ikut andil dalam proses sosialisasi dengan koperasi di kota Balikpapan melalui pelatihan SOP dan SOM bagi pengelola koperasi, disosialisasikan melalui pendekatan yang inklusif. Pendekatan inklusif dimaksudkan dalam sosialisasi kebijakan bertujuan untuk menciptakan lingkungan partisipatif di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara positif, mendukung implementasi kebijakan, dan mengatasi potensi hambatan atau kekhawatiran dari pihak-pihak yang terlibat (Suri dan Aslami 2023). Saluran informasi internal dalam koperasi Sumber Kasih Sejahtera juga .

Kejelasan informasi : Kejelasan informasi sop pada Koperasi Sumber Kasih telah disiapkan di dalam web MO (Manual Operator). Pembagian informasi kebijakan baru ataupun adanya perubahan bunga pinjaman ini juga biasanya diberikan dalam rapat anggota tahunan dan juga sosialisasi pemberitahuan informasi di grup whatsapp. Adapun kendala yang di jalani dalam penyampaian informasi ditangani dengan baik dengan adanya kolektor yang mengawasi dan membina anggota koperasi. Dalam komunikasi juga menjelaskan bahwa kejelasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pemerataan informasi. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dan disampaikan dengan efektif dapat membentuk pemahaman yang seragam di antara para anggota koperasi.

Konsisten : Konsistensi penyampaian informasi kebijakan sop pada koperasi Sumber Kasih Sejahtera adanya pertemuan ataupun rapat anggota setiap tahun mengenai kebijakan sop yang telah diterapkan selain itu juga adanya saran dan masukan dari para anggota mengenai kebijakan yang kurang efektif dalam operasional koperasi . Selain adanya rapat koperasi Sumber Kasih Sejahtera juga membuka survey dengan sample 30% dari jumlah anggota mengenai kepuasan anggota terhadap kebijakan dan melalui hasil survei tersebut akan dilakukan rapat untuk mengkaji saran dan kritik mengenai kebijakan sop. Dengan adanya interaktif bagi para anggota sehingga menimbulkan adanya partisipasi dari para penerima kebijakan sehingga membuat kebijakan lebih efektif dan efisien bagi para anggota. Rapat ini pun menyebabkan adanya konsistensi bagi penerima kebijakan.

Sumber Daya

Pada pelaksanaan kebijakan, hal yang sangat penting menurut Edward III adalah "ketidackukupan sumber daya dapat menyebabkan kebijakan tidak dilaksanakan dengan efektif." Sumber daya yang dimaksud terutama mencakup (1) sumber daya manusia, dan (2) sumber daya finansial di koperasi Sumber Kasih Sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Koperasi Sumber Kasih Sejahtera memiliki anggota terhitung 1.575 anggota hingga oktober 2024 dengan jumlah karyawan sebanyak 6 karyawan dapat diketahui bahwa setiap wilayah memiliki koordinator tim sehingga kebijakan dapat merata dengan sumber daya yang sudah cukup memadai pada setiap timnya. Diketahui bahwa manajemen pengurus sudah diatur pada MO koperasi sumber kasih sejahtera sehingga peran dan tanggung jawab para anggota pun terarah dengan jelas.

Koperasi sumber kasih Sejahtera melakukan diklat, pelatihan guna meningkatkan pemahaman setiap anggota dan manajemen pengurus mengenai manajemen keuangan. Adapun aspek penting dalam sumber daya yaitu sumber daya keuangan berdasarkan hasil penelitian juga menyatakan bahwa koperasi sumber kasih Sejahtera memiliki manajemen keuangan yang baik dan sudah menganggarkan setiap pelatihan dan kegiatan pembekalan setiap setahun sekali yang akan dilakukan baik bagi pengurus dan anggota. Adapun anggaran diklat eksternal Bagi para karyawan dengan adanya Pendidikan keuangan, pelayanan selama 25 hari, Adapun kegiatan pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup karyawan.

Disposisi

Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III, keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Namun, apabila pandangan atau sikap pelaksana tidak sejalan dengan pembuat kebijakan, proses implementasi dapat menjadi lebih kompleks. Edward III menyoroti pentingnya disposisi atau sikap pelaksana sebagai faktor kunci yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Disposisi ini mencakup kesiapan, komitmen, konsistensi, serta integritas pelaksana dalam menerapkan kebijakan dengan baik, serta sejauh mana prinsip demokrasi diterapkan. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum, anggota memahami dan berkomitmen terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang ada, seperti batas gagal kredit di bawah 5%, dan mereka mematuhi ketentuan tersebut. Kesiapan dan

komitmen anggota dalam menjalankan SOP sudah berada pada tingkat yang baik, yang terlihat dari dedikasi dan kesungguhan mereka terhadap kebijakan yang diterapkan.

Struktur birokrasi

Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sudah memadai dan pelaksana memahami serta berkeinginan untuk melaksanakan tugasnya, implementasi tetap bisa terhambat akibat struktur birokrasi yang kurang efektif. Pembagian organisasi yang tidak tepat dapat menghalangi koordinasi yang sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang kompleks, yang sering kali memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Selain itu, pembagian ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang terbatas, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, dan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, bahkan bisa mengakibatkan terabaikannya fungsi-fungsi penting (Yalia, 2014). Struktur birokrasi pada Koperasi Sumber Kasih Sejahtera sangat terorganisir dan jelas, sehingga penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan baik. Struktur organisasi di koperasi sumber kasih Sejahtera juga tidak terdapat peran yang tumpang tindih pada setiap anggota dengan tugas dan kewajiban masing-masing pengurus.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan standar operasional prosedur dalam kinerja koperasi simpan pinjam, dengan fokus pada studi kasus di Koperasi Sumber Kasih Sejahtera Balikpapan, analisis dilakukan menggunakan dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik menurut teori Edward III (yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi para pengurus dan anggota koperasi dalam implementasi kebijakan telah terkoordinir dengan sangat baik, kebijakan juga di sosialisasikan dan dirapatkan dengan baik sehingga para anggota dapat menerima dan memahami kebijakan dengan sangat baik dan menimbulkan pemerataan pemahaman kepada setiap anggota dengan menyediakan grup dan saluran komunikasi pada tiap anggota. Komunikasi yang jelas dan baik memberikan pengaruh besar terhadap penerapan kebijakan SOP di koperasi. Dengan adanya komunikasi yang efektif, setiap anggota dan pengurus dapat memahami sasaran dan prosedur yang ditetapkan dalam SOP. Langkah ini tentunya bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan menjamin semua pihak bergerak menuju satu tujuan. Komunikasi yang terbuka mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota, menciptakan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran yang positif. Saat setiap orang merasa diperhatikan, mereka akan lebih termotivasi untuk berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan. Dampak positif lainnya adalah peningkatan koordinasi antar tim, yang memungkinkan penyelesaian masalah dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan baik tidak hanya memperlancar penerapan SOP, tetapi juga memperkuat hubungan antara anggota, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan mendukung pencapaian tujuan koperasi secara keseluruhan.

Sumber daya (manusia dan finansial)

Sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang memadai memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan SOP di Koperasi

Sumber Kasih Sejahtera. Dengan dukungan keuangan yang cukup, koperasi bisa mengatur anggaran untuk pelatihan, pengembangan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja. Di sisi lain, sumber daya manusia yang terampil dan berdedikasi memastikan bahwa setiap anggota dan pengurus memahami dan melaksanakan SOP dengan efektif. Kombinasi kedua elemen ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga membantu meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan.

Disposisi

Anggota Koperasi Sumber Kasih Sejahtera menunjukkan keselarasan dengan kebijakan yang berlaku, yang tercermin dari komitmen mereka dalam mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap anggota menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk berpartisipasi, serta memiliki disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kejujuran dan transparansi dalam hubungan antar anggota semakin memperkuat rasa saling percaya, menciptakan suasana yang mendukung pencapaian tujuan bersama. Dengan sikap yang positif ini, kami bertekad untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diimplementasikan secara efektif demi kesejahteraan seluruh anggota koperasi.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi Koperasi Sumber Kasih Sejahtera sangat terorganisir dan jelas, sehingga penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan baik. Susunan birokrasi yang teratur memiliki peranan signifikan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Kehadiran mekanisme yang jelas, seperti Prosedur Operasional Standar (SOP) yang terstruktur dan mudah dimengerti, memungkinkan organisasi untuk melaksanakan

tugasnya dengan lebih optimal. Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi membuat setiap anggota tim memahami tanggung jawab mereka, sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan koordinasi antar bagian.

Dengan tersusunnya struktur birokrasi yang jelas pada koperasi sumber kasih Sejahtera sehingga struktur birokrasi berfungsi dengan baik, para pelaksana kebijakan akan lebih mampu mengimplementasikan kebijakan secara efisien, meskipun dihadapkan pada beragam tantangan

DAFTAR PUSTAKA

- Amar,s.(2016). Analisis Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Pada Anggota Koperasi Pegawai Republik INDONESIA (KPRI) BHINNEKA KARYAPAMEKASAN(i, Vol 1, No 2, Nov 2016).
- Bíl, M., Heigl, F., Janoška, Z., Vercayie, D., & Perkins, S. E. (2020). Benefits and challenges of collaborating with volunteers: Examples from National Wildlife Roadkill Reporting Systems in Europe. *Journal for Nature Conservation*, 54, 125798. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> (IMPLEMENTASIPENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA, n.d.)
- Hendry Andry. Zulkifli., Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Ukm Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pengrajin Sagu)(Vol, 3 No. 1 /2022).
- Indrasar,J.M (2019).Pembuatan Standard Operating Procedure (Sop) Pada Koperasi Karyawan Angkasa Pura 1 (Kokapura) Cabang Surakarta. <https://etd.repository.ugm.ac.id>
- Iradatun Nufu.,(2023). Strategi Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Harapan Bersama.
- Maratusolekhah, N., & Suryantari, E. P. (n.d.). Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dharma Siaga (Vol. 5, Issue 2022).
- Muyasaroh farhaniyah huda.,(2021).Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan TeoriImplementasi Kebijakan George C Edward Iii.
- Naeshela, F. (2016). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (Cu) Femung PebayaCabang Mentarang Di Kecamatan MENTARANG KABUPATEN MALINAU. 4(3), 354-366.
- Organisasi, B., Klinis, S., & Kerja, D. A. N. M. (2020). *JURNAL ADMINISTRASI PENDIDIKANINDONESIA*. 11(2), 106-117.
- Sahuda. Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Berau(Vol 3 No 10 Tahun 2024).
- Satya Yuda, A., Tabina Cahyarani Sunaryo, A., & Pamuraharjo, H. (2024). Analisis Pengaruh SOP, Peralatan Keamanan, dan Pelatihan Petugas AVSEC Terhadap Keamanan Penerbangan. *Journal of Social Science and Humanities Research*, 3(1), 147-151. <https://doi.org/10.56854/jsshr.v3i1.364>
- Satyanovi, V. A., Hanggana, S., Hananto, S. T., Murni,S., Syafiqurrahman, M., Hapsari, A. A., & Zoraifi, R. (2022). Pendampingan Penyusunan Sop Pada Unit Usaha Simpan Pinjam KoperasiKelompok Tani Sari Rejeki Karanganyar. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.24198/Kumawula.V5i1.36092>
- Syarif akmur.,Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan(Volume 1 Number 3, May, 2023).
- Yurensi laar., f.m.g. tulus.,salmin dengo. Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.(JapNo.120 Vol. Viii (2022).